

BAB V

PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 4 AYAT (2)

PENGERTIAN

Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Penghasilan tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final adalah:

1. **Persewaan tanah dan/atau bangunan**
2. **Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan**
3. **Jasa Konstruksi**

Istilah '**final**' di sini berarti bahwa, jenis **pajak ini harus diselesaikan / lunas dalam masa pajak yang sama** seperti mereka diterima, dan tidak perlu dilaporkan lagi pada akhir tahun pajak.

PERATURAN TERKAIT

Peraturan-peraturan terkait pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah:

1. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh;
2. PP Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 71 Tahun 2008;
3. PP Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 5 Tahun 2002;
4. PP Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 40 Tahun 2009;
5. Keputusan Menteri Keuangan 635/KMK.04/1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002.

PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

- a. Objek PPh Final adalah sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industri.
- b. Besarnya PPh Final yang dipotong adalah **10% dari jumlah bruto nilai persewaan**, baik yang menyewakan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan.
- c. Jumlah bruto nilai persewaan adalah jumlah yang dibayarkan/terutang oleh penyewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, fasilitas lainnya, dan *service charge* (baik perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun disatukan).

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

- a. objek PPh final adalah penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati.
- b. besarnya PPh Final yang dipungut adalah **5% dari jumlah bruto nilai pengalihan** hak atas tanah dan/atau bangunan.
- c. pembebasan PPh Final dapat diberikan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada:
 1. orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. **Pembebasan diberikan melalui penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) oleh Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar**

2. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus yaitu pembebasan tanah oleh pemerintah untuk proyek-proyek jalan umum, saluran pembuangan air, waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, saluran irigasi, pelabuhan laut, bandar udara, fasilitas keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan bencana lainnya, dan fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
3. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak (seperti: pemerintah dan perwakilan negara asing).

PPh FINAL ATAS JASA KONSTRUKSI

- a. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- b. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/ atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- c. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh Orang Pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
- d. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh Orang Pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*)

- serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).
- e. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh Orang Pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
 - f. Pengguna Jasa adalah Orang Pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
 - g. Penyedia Jasa adalah Orang Pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.
 - h. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.

TARIF PPh PASAL 4 AYAT (2) UNTUK JASA KONSTRUKSI

- a. 2% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
- b. 3% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi selain usaha kecil;
- c. 4% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
- d. 4% untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan
- e. 6% untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

SIMULASI PENGHITUNGAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) SEWA GEDUNG

CONTOH KASUS 1

Dalam rangka pelaksanaan Ramah Tamah Wisuda Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Tahun 2015. Pada tanggal 30 April 2015, Bendahara UIN Alauddin Makassar (NPWP 00.016.303.0-804.000) membayar sewa Gedung Aroepala yang berlokasi di Jl. Hertasning Baru Makassar sebesar Rp30.000.000,00. Pengelola Gedung Aroepala (NPWP 02.003.457.0-812.000) menerbitkan Faktur Pajak dengan kode nomor seri 020.000-15.00001001 pada tanggal 30 April 2015

Bagaimanakah perlakuan pajaknya?

PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, wajib dibayar PPh yang bersifat final dengan tarif 10% dari jumlah bruto nilai persewaan.

Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan oleh penyewa yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan “*service charge*” baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

Atas pembayaran tersebut bendahara membuat perhitungan sebagai berikut:

Besarnya PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang harus dipotong atas pembayaran sewa dan *service charge* adalah:

$$10\% \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00.$$

PEMUNGUTAN PPN

Atas pembayaran sewa gedung wajib dipungut PPN oleh bendahara dengan tarif $10\% \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$. PPN tersebut disetor ke kas negara pada tanggal 30 April 2015.

Kewajiban bendahara UIN Alauddin Makassar adalah:

- a. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak Gedung Aroepala, dan membubuhi cap “disetor tanggal” serta membubuhi tanda tangan;
- b. membuat bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas nama Gedung Aroepala;
- c. membuat SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan SSP PPN atas nama Gedung Aroepala dan ditandatangani oleh Sunniati;
- d. menyerahkan dokumen SPM dilengkapi dengan SSP dan Faktur Pajak ke KPPN;
- e. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan:
 1. SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN lembar ke-1 yang telah divalidasi (dibubuhi cap “telah dibukukan”) oleh KPPN;
 2. Faktur pajak lembar ke-2; dan
 3. bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2), kepada Pengelola atas nama Gedung Aroepala;
- f. melaporkan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) ke KPP Pratama Makassar paling lama tanggal 20 Mei 2015;
- g. melaporkan SPT Masa PPN ke KPP Pratama Makassar paling lama tanggal 31 Mei 2015. Mengingat tanggal 31 Mei 2015 merupakan hari libur, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya (1 Juni 2015);

Bea Meterai

Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar:

- a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;
- b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00

CONTOH KASUS 2

UIN Alauddin Makassar akan melakukan pembangunan gedung baru Pascasarjana. Adapun yang menjadi pemenang tender adalah CV. Amrih New Karya sebagai pelaksana konstruksi dan Nirwana Konsultan, seorang PKP, sebagai perencana konstruksi.

CV. Amrih New Karya (NPWP: 02.051.163.0-804.000) adalah perusahaan konstruksi yang memiliki **kualifikasi usaha menengah** dibuktikan dengan sertifikasi pelaksana konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) beralamat di Jl. Sultan Alauddin II No. 11 Makassar, sedangkan CV. Nirwana Konsultan (NPWP: 02.463.027.9-801.000) adalah konsultan sipil yang memiliki sertifikasi untuk perencanaan konstruksi dengan **kualifikasi usaha kecil** beralamat di Jl. Kerukunan Barat I BTP Makassar

Nilai proyek berdasarkan Dokumen Kontrak adalah sebesar:

Rp5.000.000.000,00 (tidak termasuk PPN).

Pembayaran dilakukan sesuai dengan progress pembangunan yang dilaporkan. Di tahun 2015, dilakukan pembayaran atas pelaksanaan konstruksi kepada CV. Amrih New Karya pada tanggal 22 Juli 2015 sebesar Rp1.500.000.000,00 atas tagihan tanggal 15 Juli 2015 dengan kode nomor Faktur Pajak 020.000-15.00000650.

Sedangkan pembayaran atas kontrak perencanaan konstruksi kepada CV. Nirwana Konsultan dilakukan pada tanggal 5 Juli 2015 sebesar Rp50.000.000,00 atas tagihan tanggal 4 Juli 2015 dengan kode nomor seri Faktur Pajak 020.000-15.00000950.

Bagaimanakah kewajiban perpajakan yang harus dilakukan?

Pemotongan/Pemungutan PPh

Penghitungan pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi di atas, yaitu:

Bendahara UIN Alauddin Makassar memotong PPh Final atas jasa konstruksi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Konstruksi oleh CV. Amrih New Karya dibayar pada tanggal 22 Juli 2015

$$\mathbf{Rp1.500.000.000,00 \times 3\% = Rp45.000.000,00}$$

- b. Perencanaan Konstruksi oleh CV. Nirwana Konsultan dibayar pada tanggal 5 Juli 2015

$$\mathbf{Rp50.000.000,00 \times 4\% = Rp2.000.000,00}$$

PPh Final tersebut dipotong dari pembayaran kepada CV. Amrih New Karya dan CV. Nirwana Konsultan.

“ UNTUK DIKETAHUI LEBIH LANJUT ”

Tarif 3% untuk pelaksanaan konstruksi di atas dikenakan karena pelaksana konstruksi memiliki kualifikasi menengah (selain usaha kecil).

Tarif 4% untuk perencanaan konstruksi di atas dikenakan karena perencana memiliki kualifikasi usaha (usaha kecil).

Pemungutan PPN

Bendahara UIN Alauddin Makassar memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari transaksi jasa konstruksi tersebut.

- a. Pelaksanaan Konstruksi oleh CV. Amrih New Karya dibayar pada tanggal 22 Juli 2015

$$\mathbf{Rp1.500.000.000,00 \times 10\% = Rp150.000.000,00}$$

- b. Perencanaan Konstruksi oleh CV. Nirwana Konsultan dibayar pada tanggal 5 Juli 2015

$$\mathbf{Rp50.000.000,00 \times 10\% = Rp5.000.000,00}$$

Kewajiban bendahara UIN ALauddin Makassar atas pembayaran jasa konstruksi tersebut adalah:

- a. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak CV. Amrih New Karya dan CV. Nirwana Konsultan, dan membubuhi cap “disetor tanggal” serta membubuhi tanda tangan;
- b. membuat bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi paling lama 31 Juli 2015; untuk CV. Amrih New Karya sebesar Rp45.000.000,00; dan untuk dan CV. Nirwana Konsultan sebesar Rp2.000.000,00.
- c. menyerahkan dokumen SPM dilengkapi dengan SSP dan Faktur Pajak ke KPPN;
- d. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan:
 1. SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan SSP PPN lembar ke-1 yang telah divalidasi (dibubuhi cap “telah dibukukan”) oleh KPPN;
 2. Faktur pajak lembar ke-2; dan
 3. bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2), kepada CV. Amrih New Karya dan CV. Nirwana Konsultan.
- e. melakukan pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) paling lama tanggal 20 Agustus 2015 ke KPP Pratama Makassar;
- f. melakukan pelaporan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar paling lama tanggal 31 Agustus 2015.

Bea Meterai

Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar:

- a. Materai Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;
- b. Materai Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00.

LAMPIRAN CONTOH KASUS 1 (Sewa Gedung)

Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Lembar ke-1 dari 2 yang memuat
 Lembar ke-2 dari 2 Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 dari 2 petyasa



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MAKASSAR

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN

Nomor: 023/57/2015 (H)

NPWP	: 0 2 - 0 0 3 - 4 8 7 - 0 - 8 1 2 - 0 0 0	(3)
Nama	: G E D U N G A R O E P A L A	
Alamat	: J L H E R T A S N I N G B A R U M A K A S S A R	
Lokasi Tanah dan atau Bangunan	: J L H E R T A S N I N G B A R U M A K A S S A R	(4)

Jumlah Bruto Nilai Sewa (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)
30.000.000	10%	3.000.000

Terbilang : Tiga Juta Rupiah

Makassar, 30 April 2015
 Pemotong Pajak (H)

NPWF	: 0 0 - 0 1 6 - 3 0 3 - 0 - 8 0 4 - 0 0 0 0	
Nama	: B E N D U I N A L A U D D I N	
	: M A K A S S A R	

Tanda Tangan, Nama dan Cap



Sumati

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

P: 1.1.33.12
Lampiran 1.7 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2006

Pengisian SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2)

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR 1												
	Untuk Arsip Wajib Pajak														
NPWP : 000163030804000 <i>Dikisi sesuai dengan Nomor Pajak Wajib Pajak yang dimiliki</i>															
NAMA WP : Bendahara UIN Alauddin Makassar															
ALAMAT WP : Jl. Sultan Alauddin No.36 Samata															
NOP :0 <i>Dikisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i>															
ALAMAT OP : Jl. Hertasing Baru Makassar															
Kode Akan Pajak 411128	Kode Jenis Setoran 403	Uraian Pembayaran : PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penyewaan gedung dan/atau bangunan													
Masa Pajak			Tahun Pajak												
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2	0	1	5
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Dikisi Tahun berurutannya Pajak</i>			
Nomor Ketetapan : / / / <i>Dikisi sesuai Nomor Ketetapan : SKPKB, SKPKBT</i>															
Jumlah Pembayaran : Rp 3.000.000 Terbilang : Tiga juta rupiah <i>Dikisi dengan rupiah penuh</i>															
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal Cap dan tanda tangan								Wajib Pajak/Penyetor Makassar, Tanggal 30 April 2015 Cap dan tanda tangan  Bendahara UIN Alauddin Makassar							
Nama Jelas :								Nama Jelas : Sunniati							
* Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa * Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran															
F.2.0.32.01															

Pengisian SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2)

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)		<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Formulir isi digurakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)		<input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- Masa Pajak 0 7 / 2 0 1 5
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK				
1. NPWP	0 0 0 1 6 3 0 3 0 - 8 0 4 0 0 0			
2. Nama	B E N D A H A R A U I N A L A U D D I N N A K A S S A R			
3. Alamat	J L S U L T A N A L A U D D I N N O 3 B S A M A T A			
BAGIAN B. OBJEK PAJAK				
Uraian	KAP/LIS	Nta/Objek Pajak (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/Diotori Sanksi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro				
a. Bunga Deposito/Tabungan				
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	41128/404			
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	41128/404			
b. Diskonto/Sertifikat Bank Indonesia	41128/404			
c. Jasa Giro	41128/404			
2. Transaksi Penjualan Saham				
a. Saham Pendiri	41128/407			
b. Bukan Saham Pendiri	41128/407			
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	41128/401			
4. Hadiah Undah	41128/405			
5. Peredaran Tanah dan/atau Bangunan				
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak	41128/400	30.000.000	10	3.000.000
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyewakan Sendiri PPH	41128/400			
6. Jasa Konstruksi				
a. Perencana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPH	41128/408			
2) Penyedia Jasa yang Menyewakan Sendiri PPH	41128/408			
b. Pelaksana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPH	41128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyewakan Sendiri PPH	41128/409			
c. Pengawas Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPH	41128/408			
2) Penyedia Jasa yang Menyewakan Sendiri PPH	41128/408			
7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan	41128/402			
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	41128/411			
9. Transaksi Derivat/ Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa	41128/418			
10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	41128/419			
11. Penghasilan Tertentu Lainnya				
a.				
b.				
c.				
JUMLAH		30.000.000		3.000.000
Terbilang : Tiga Juta Rupiah				
BAGIAN C. LAMPIRAN				
1.	<input checked="" type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak : 1 lembar			
2.	<input checked="" type="checkbox"/> Daftar Buku Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2)			
3.	<input checked="" type="checkbox"/> Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) : 1 lembar			
4.	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus			
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN				
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			Ditetapkan Oleh Petugas ...	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN			<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK	
Nama	B E N D A H A R A U I N A L A U D D I N			
NPWP	0 0 0 1 6 3 0 3 0 - 8 0 4 0 0 0			
Tanda Tangan & Cap		Tanggal	2 0 1 5 / 2 0 1 5	Tanda Tangan
			tanggal / bulan / tahun	
P.1.32.04				
Lampiran 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2009				

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPs FINAL PASAL 4 AYAT (2)	Masa Pajak 0 4 / 2 0 1 5			
No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Objek Pajak (Rp)	PPs yang Dipotong / Dipungut (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	02.000.457.0-812.000	Gedung Arogala	02365/2015	30 April 2015	30.000.000	3.000.000
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
JUMLAH					30.000.000	3.000.000
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KLASA WAJIB PAJAK			Tanggal 0 0 0 5 / 2 0 1 5 Tanggal Bulan Tahun			
Nama B E N D U I N I A L A U D O I N M K S			Tanda Tangan & Cap			
NPWP 0 0 0 1 8 3 0 3 0 - 8 0 4 0 0 0						
0.1.1.22.04			Lampiran 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009			

Pembuatan SSP PPN


 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak											
	NPWP : 0 0 0 1 6 3 0 3 0 8 0 4 0 0 0 <i>Diberi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i> NAMA WP : UIN Alauddin Makassar ALAMAT WP : Jl. Sultan Alauddin No.36 Samata													
NOP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>Diberi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i> ALAMAT OP : Jl. Hertasing Baru Makassar														
Kode Akun Pajak 4 1 1 2 1 1		Kode Jenis Setoran 9 0 0												
Uraian Pembayaran : PPN Sewa Gedung oleh Pemangut PPN Dalam Negeri														
Masa Pajak											Tahun Pajak			
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2 0 1 5		
<i>Berlaku mulai (x) pada kolom berikut, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>											<i>Diberi Tahun terutangnya Pajak</i>			
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> <i>Diberi sesuai Nomor Ketetapan : SPK, SEPKB, SEPKBT</i>														
Jumlah Pembayaran : Rp 3.000.000 <i>Diberi dengan rupiah penuh</i> Terbilang : Tiga juta rupiah														
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal _____ Cap dan tanda tangan							Wajib Pajak/Penyetor Pare-Pare , Tanggal 30 April 2015 Cap dan tanda tangan  Bendahara UIN Alauddin Makassar Nama Jelas : Sunniati							
* Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa * Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran														
F.2.0.32.01														

Faktur Pajak

FAKTUR PAJAK		Lampiran 1 : Lembar Pembeli SKP/Penerima JKP kegiatan Faktur Pajak Masukan
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-15.00001001		
Pengusaha Kena Pajak		
N a m a : GEDUNG AROEPALA		
Alamat : Jl. Herlasing Baru Makassar		
NPWP : 02.003.457.0-812.000		
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak		
N a m a : Bendahara UIN Alauddin Makassar		
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No.36 Samata		
NPWP : 00.016.303.0-804.000		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1	Sewa Gedung	30.000.000
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin ^{*)}		30.000.000
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang sudah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		30.000.000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		3.000.000
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
Jumlah		Rp.
Makassar, 30 April 2015		
 Gedung Aroepala		
*) Coret yang tidak perlu		

Pengisian SPT PPN Masa


 DEPARTEMEN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN Baccabik terkebil dabulu Buku Peranjik Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai	FORMULIR 1107 PUT	
Nama Pemungut :	Bendahara UIN Alauddin Makassar	NWPW :	<input type="checkbox"/> 00 - <input type="checkbox"/> 0116 - <input type="checkbox"/> 302 - <input type="checkbox"/> 0 - <input type="checkbox"/> 8112 - <input type="checkbox"/> 000	
Alamat :	Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata	Masa :	<input type="checkbox"/> 04 s.d. <input type="checkbox"/> 04 - <input type="checkbox"/> 2015	
No. Telp :	(0411) 841870	Pembetulan Ke :	
Usaha :			
Zusuhara Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), (45), (46), (47), (48), (49), (50), (51), (52), (53), (54), (55), (56), (57), (58), (59), (60), (61), (62), (63), (64), (65), (66), (67), (68), (69), (70), (71), (72), (73), (74), (75), (76), (77), (78), (79), (80), (81), (82), (83), (84), (85), (86), (87), (88), (89), (90), (91), (92), (93), (94), (95), (96), (97), (98), (99), (100)	A. PPN DAN PPN BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH			
	1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN		Rp 3.000.000	(1)
	PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN			
	Jumlah PPN dan PPN BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN		Rp 3.000.000	
	2 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran		Rp	(2)
	PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran		Rp	
	Jumlah PPN dan PPN BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran		Rp	
	B. PPN DAN PPN BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH			(3)
	PPN yang dipungut		Rp	
	PPn BM yang dipungut		Rp	
Jumlah PPN dan PPN BM yang dipungut		Rp		
Lampiran : <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus <input checked="" type="checkbox"/> SSP				
1 PPN sebanyak		1 Lembar	Rp 3.000.000	
2 PPN BM sebanyak	 Lembar	Rp	
<input type="checkbox"/>				
Perhatian Dengan mengisi formulir ini, pemungut pajak menyatakan akan bertanggung jawab atas kebenaran data yang tertera di atas dan bersedia dipertanggungjawabkan.		Makassar, 1 Juni 2015 Kuasa Bendaharawan/Pengurus		
<input checked="" type="checkbox"/> Pemungut <input type="checkbox"/> Kuasa		Tanda tangan : Nama Jelas : SUNNIAH Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN Cup Perusahaan :		

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		LAMPIRAN I DAFTAR PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH						FORMULIR 1107 PUT 1		
		Masa Pajak : 04 04 2015 - 30 04 15 (Pembetulan Ke: (.....))								
NAMA PEMUNGUT : Bendahara UN Abubidin Makassar		NPWP : 00.519.303.0-104.009								
No.	Nama Rekanan	NPWP Rekanan	FAKTUR PAJAK		Kode dan Nomor Seri PP Yang Diganti	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	Tanggal Bayar Taghan	Tanggal Seter PPN BM
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal						
A. PPN dan PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KPPN										
1	Gedung Anugrah	02.003.407.0-412.000	020.000-15.00001001	30/4/2015		30.000.000	3.000.000		30/4/2015	
2										
3										
4										
5										
dst.										
JUMLAH - dijumlahkan ke Formulir 1107 PUT						1	3.000.000			
B. PPN dan PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN										
1										
2										
3										
4										
5										
dst.										
JUMLAH - dijumlahkan ke Formulir 1107 PUT						2	3.000.000			
C. JUMLAH (A+B)										
						3	3.000.000			

LAMPIRAN CONTOH KASUS 2 (Jasa Konstruksi)

Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 untuk : Pemotong/Pemungut Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MAKASSAR (1)

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : 122/potput-final/2014 (1)

NPWP : 0 2 - 0 0 1 - 1 6 3 - 0 - 8 0 4 - 0 0 0 (1)

Nama : C V A M R I H N E W K A R Y A

Alamat : J L S U L T Y A N A L A U D D I N I I N O 1 1

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil		2%	
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 di atas	1.500.000.000	3%	45.000.000
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha		4%	
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		6%	
JUMLAH				45.000.000


Terbilang : empat puluh lima juta rupiah


Makassar, 22 Juli 2015 (1)
Pemotong/Pemungut Pajak (1)

NPWP : 0 0 - 0 1 6 - 3 0 3 - 0 - 8 0 4 - 0 0 0

Nama : B E N D A H A R A U I N A L A U D D I N M A K A S S A R

Tanda Tangan, Nama dan Cap





 Sumiati

Perhatian :
 1. Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pembentahan (SPT) Tahunan PPh.
 2. Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

F.3.1.33.1B
Lampiran 18 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009

Lampiran-1 surat: Wajib Pajak
Lampiran-2 surat: Kantor Pelayanan Pajak
Lampiran-3 surat: Pemotong/Pemungut Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MAKASSAR 19

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : 123/potput-final/2014 13

NPWP : 02 - 463 - 027 - 9 - 801 - 000

Nama : C V N I R W A N A K O N S U L T A N

Alamat : J L K E R U K U N A N B A R A T I B T P M K S

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil		2%	
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 di atas		3%	
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha	50.000.000	4%	2.000.000
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		6%	
JUMLAH				2.000.000

Terbilang : dua juta rupiah

Makassar, 5 Juli 2015 14
Pemotong/Pemungut Pajak 19


NPWP : 00 - 016 - 303 - 0 - 804 - 000

Nama : B E N D A H A R A U I N A L A U D D
I N M A K A S S A R

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap



Sunnati



Lampiran 1B Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 83/PJ/2009

F.1.1.33.16

Pembuatan SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) Masa

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak											
	NPWP : 0 0 0 1 6 3 0 3 0 8 0 4 0 0 0 <small>Ditisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>												
NAMA WP : UIN ALAUDDIN MAKASSAR ALAMAT WP : JL. SULTAN ALAUDDIN NO. 36 SAMATA - GOWA													
NOP : <small>Ditisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>													
ALAMAT OP :													
Kode Akun Pajak 4 1 1 1 2 8	Kode Jenis Setoran 4 0 9	Uraian Pembayaran : PPh Final Jasa Konstruksi											
Masa Pajak											Tahun Pajak		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2 0 1 5	
<small>Ditisi tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang bersangkutan</small>												<small>Ditisi Tahun terbitnya Pajak</small>	
Nomor Ketetapan : / / / / <small>Ditisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SPPKB, SPPKBT</small>													
Jumlah Pembayaran : Rp 47.000.000 <small>Ditisi dengan rupiah penuh</small> Terbilang : empat puluh tujuh juta rupiah													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small>							Wajib Pajak/Penyetor Makassar, Tanggal 31 Juli 2015 <small>Cap dan tanda tangan</small>						
Nama Jelas :							Nama Jelas : Sunniati						
* Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa * Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													

Pengisian SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) Masa

	DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2) Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- Masa Pajak 0 7 / 2 0 1 5	
	BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK			
1. NPWP	0 0 - 0 1 8 3 0 3 0 - 8 0 8 0 0 0			
2. Nama	B E N D A H A R A U I N A L A U D D I N M A R A S S A R			
3. Alamat	J L S U L T A N A L A U D D I N N O 3 8 S A M A T A			
BAGIAN B. OBJEK PAJAK				
Uraian (1)	KAPUS (2)	Nilai Objek Pajak (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPh yang Dibotong/ Dipungut/Dibayar (Rp) (5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SB/ dan Jasa Gin				
a. Bunga Deposito/Tabungan				
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri				
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri				
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia				
c. Jasa Gin				
2. Transaksi Penjualan Saham				
a. Saham Pendit				
b. Bukan Saham Pendit				
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara				
4. Hadiah Undian				
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan				
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak				
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyewakan Sendiri PPh				
6. Jasa Konstruksi				
a. Perencana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh				
2) Penyedia Jasa yang Menyewakan Sendiri PPh				
b. Pelaksana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh				
2) Penyedia Jasa yang Menyewakan Sendiri PPh				
c. Pengawas Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh				
2) Penyedia Jasa yang Menyewakan Sendiri PPh				
7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan				
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi				
9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Dipegang/dijual di Bursa				
10. Dividen yang Ditetapkan/Dipembayarkan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri				
11. Penghasilan Tertentu Lainnya				
a.				
b.				
c.				
JUMLAH		1.500.000.000	47.000.000	
Terbilang				
BAGIAN C. LAMPIRAN				
1. <input checked="" type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak <input type="checkbox"/> lembar				
2. <input checked="" type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2)				
3. <input checked="" type="checkbox"/> Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) : <input type="checkbox"/> 2 lembar				
4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus				
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN				
Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.				Ditetapkan di SPT Masa (terima): <input type="checkbox"/> Langsung dari WF <input type="checkbox"/> Melalui Poo
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK				
Nama: B E N D A H A R A U I N A L A U D D I N M A R S NPWP: 0 0 - 0 1 8 3 0 3 0 - 8 0 8 0 0 0				Tanggal: 0 7 / 2 0 1 5 (Angka, bulan, tahun)
Tanda Tangan & Cap: 				Tanda Tangan: _____ (Angka, bulan, tahun)
K.1.1.32.04		Lampiran 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PDR-81/PJ.2009		

Daftar Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)				Masa Pajak 0 7 / 2 0 1 5	
No	NPWP	Nama	Sifat Pemotongan/Pemungutan		Nilai Dasar Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong /Dipungut (Rp)	
			Nomor	Tanggal			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	02.051.703.0-004.000	CV. Anvith New Karya	124/potpd-final/2015	5 Juli 2015	50.000.000	2.000.000	
2	02.403.027.9-001.000	CV. Nirwana Konsultan	123/potpd-final/2015	22 Juli 2015	1.550.000.000	45.000.000	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
JUMLAH					1.550.000.000	47.000.000	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KLASA WAJIB PAJAK			Nama S E N D U I N A L A U D I N M E S		Tanggal 2 0 0 2 0 1 5 (tanggal) (bulan) (tahun)		
NPWP 0 0 0 1 9 3 0 3 2 - 9 0 4 0 0 0			Tanda Tangan & Cap				

Pembuatan SSP PPN (Pelaksana Konstruksi)

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR 1										
	Untuk Arsip Wajib Pajak												
NPWP : 0 2 0 5 1 1 6 3 0 8 0 4 0 0 0 <i>Dikl. sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>													
NAMA WP : CV. AMRIH NEW KARYA													
ALAMAT WP : JL. SULTAN ALAUDDIN III NO. 11 MAKASSAR													
NOP : <i>Dikl. sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i>													
ALAMAT OP : _____													
Kode Akun Pajak 4 1 1 2 1 1		Kode Jenis Setoran 9 0 0											
Uraian Pembayaran : PPN Jasa Konstruksi oleh Pemungut PPN Dalam Negeri _____ _____													
Masa Pajak										Tahun Pajak			
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2 0 1 5	
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang bersangkutan</i>												<i>Dikl. Tahun terutangnya Pajak</i>	
Nomor Ketetapan : _____ / _____ / _____ / _____ / _____ <i>Dikl. sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPEB, SKPERB</i>													
Jumlah Pembayaran : Rp 150.000.000 <i>Dikl. dengan rupiah penuh</i> Terbilang : seratus lima puluh juta rupiah													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal _____ Cap dan tanda tangan							Wajib Pajak/Penyetor Makassar, Tanggal 22 Juli 2015 Cap dan tanda tangan						
Nama Jelas : _____							Nama Jelas : Sumiati						
* Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa * Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													

Pembuatan SSP PPN (Konsultan)

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR 1										
	Untuk Arsip Wajib Pajak												
NPWP : 0 2 4 6 3 0 2 7 9 8 0 1 0 0 0													
<small>Dikl sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>													
NAMA WP : CV. NIRWANA KONSULTAN													
ALAMAT WP : JL. KERUKUNAN BARAT I BTP MAKASSAR													
<hr/>													
NOP :													
<small>Dikl sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>													
ALAMAT OP : _____													
<hr/>													
Kode Akun Pajak 4 1 1 2 1 1		Kode Jenis Setoran 9 0 0											
Uraian Pembayaran : PPN Jasa Konstruksi oleh Pemungut PPN Dalam Negeri _____ _____													
Masa Pajak											Tahun Pajak		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2 0 1 5	
<small>Beritanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>											<small>Dikl tahun terutang Pajak</small>		
Nomor Ketetapan : / / /													
<small>Dikl sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small>													
Jumlah Pembayaran : Rp 5.000.000 <small>Dikl dengan rupiah penuh</small>													
Terbilang : lima juta rupiah													
<hr/>													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal _____ Cap dan tanda tangan							Wajib Pajak/Penyetor Makassar, Tanggal 5 Juli 2015 Cap dan tanda tangan						
Nama Jelas : _____							 Nama Jelas : Sunnati						
* Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa * Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													
F.2.0.32.01													


Faktur Pajak Pelaksana Konstruksi


FAKTUR PAJAK		Lembar ke-1 : Untuk Pembeli BKP/Passtema JKP sebagai bukti Pajak Masukan
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-15.00000650		
Pengusaha Kena Pajak		
N a m a : CV. AMRIH NEW KARYA		
Alamat : JL. SULTAN ALAUDDIN II NO. 11 MAKASSAR		
NPWP : 02.051.163.0-804.000		
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak		
N a m a : BENDAHARA UIN ALAUDDIN MAKASSAR		
Alamat : JL. SULTAN ALAUDDIN NO. 36 SAMATA-GOWA		
NPWP : 00.016.303.0-804.000		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1	Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Ged. Pascasarjana)	1.500.000.000
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		1.500.000.000
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang sudah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		1.500.000.000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		150.000.000
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
Jumlah		Rp.
		<p>Makassar, 15 Juli 2015</p>  <p>(Amrih) CV. Amrih New Karya</p>
*) Corat yang tidak perlu		

Faktur Pajak Konsultan

FAKTUR PAJAK		Lampiran ke-1 : Urutak Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-15.00000950		
Pengusaha Kena Pajak		
N a m a	:	CV. NIRWANA KONSULTAN
Alamat	:	JL. KERLUKUNAN BARAT I BTP MAKASSAR
NPWP	:	02.453.027.9-801.000
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak		
N a m a	:	BENDAHARA UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Alamat	:	JL. SULTAN ALAUDDIN NO. 36 SAMATA-GOWA
NPWP	:	00.016.303.0-804.000
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1	Jasa Perencanaan Konstruksi (Ged. Pascasarjana)	50.000.000
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		50.000.000
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang sudah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		50.000.000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		5.000.000
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
Jumlah		Rp.
Makassar, 4 Juli 2015  (Ulfayanti) CV. Uffa Consultant		
*) Coret yang tidak perlu		

Pengisian SPT Masa PPN

 DEPARTEMEN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN Barulah terlebit dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai	FORMULIR 1107 PUT
Nama Pemangut : Bendahara UIN Alauddin Makassar Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata-Gowa No. Telp : Usaha :	NPWP : <input type="text" value="000"/> - <input type="text" value="0116"/> - <input type="text" value="303"/> - <input type="text" value="0"/> - <input type="text" value="804"/> - <input type="text" value="000"/> Masa : <input type="text" value="07"/> s.d. <input type="text" value="07"/> - <input type="text" value="2014"/> Pembetulan Ke : (.....) :	
Berkas Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2000, adalah spt. Masa yang berakhir pada tanggal 31 Desember atau pada tanggal 31 bulan lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.	<p>A. PPN DAN PPN BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH</p> <p>1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp 155.000.000 ① PPN BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp Jumlah PPN dan PPN BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp 155.000.000</p> <p>2 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp ② PPN BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp Jumlah PPN dan PPN BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp</p> <p>B. PPN DAN PPN BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH</p> <p>PPN yang dipungut Rp ③ PPN BM yang dipungut Rp Jumlah PPN dan PPN BM yang dipungut Rp</p> <p>Lampiran : <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus <input checked="" type="checkbox"/> SSP 1 PPN sebanyak 2 Lembar Rp 155.000.000 2 PPN BM sebanyak Lembar Rp <input type="checkbox"/></p>	
<p>Pemungut Dengan menyetujui pernyataan di atas sesuai di atasnya, saya menyetujui bahwa spt yang terdapat pada surat pemberitahuan ini akan benar-benar dipergunakan untuk tujuan yang ditetapkan oleh dan tidak dipungut</p> <p><input type="checkbox"/> Pemangut <input type="checkbox"/> Kuasa</p>	<p>Makassar, 20 Agustus 2015</p> <p>Kuasa Bendaharawan/Pengurus</p> <p>Tanda tangan : Nama Jelas : Sumardi Jabatan : Bendahara UIN Alauddin Makassar Cap Perusahaan :</p> 	


 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		LAMPIRAN 1 DAFTAR PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH										FORMULIR 1107 PUT 1	
		Masa Pajak : 017 s.d. 017 - 2011-2 Pembetulan Ke : (.....)											
NAMA PEMUNGUT : Bendahara UIN Alauddin Makassar NPWP : 00.016.303.0-804.000		F A K T U R P A J A K Kode dan Nomor Seri : Kode dan Nomor Seri :		Kode dan Nomor Seri PPh Yang Dibatasi Tanggal :		DPP (Rupiah) PPh (Rupiah)		PPn BM (Rupiah) Tanggal Bayar Tagihan :		Tanggal Sisir PPh PPh BM			
A. PPN dan PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KPPN													
1	CV. Azzah New Karya	00-403-207-0-805-000	000.000-16.00000660	5/7/2015	50.000.000	5.000.000		5/7/2015	5/7/2015				
2	CV. Niwara Kencana	00-051-183-0-504-000	000.000-16.00000660	15/7/2015	1.500.000.000	150.000.000		22/7/2015	22/7/2015				
3													
4													
5													
dit.													
JUMLAH - dipisahkan ke Formulir 1107 PUT												1 155.000.000	
B. PPN dan PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN													
1													
2													
3													
4													
5													
dit.													
JUMLAH - dipisahkan ke Formulir 1107 PUT												2	
C. JUMLAH (A+B)													
D.T.2.32.03													

JENIS KESALAHAN DALAM PENGISIAN SSP PPh PASAL 4 AYAT 2

1. Kesalahan dalam penulisan kode akun pajak dan kode jenis setoran
2. Wajib pajak/bendahara terkadang lupa membubuhi tanda tangan dan cap stempel pada lembar SSP PPh pasal 4 ayat 2.

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak									
NPWP	000016103004000												
Dikisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki													
NAMA WP	Bendahara UIN Alauddin Makassar												
ALAMAT WP	Jl. Sultan Alauddin No.36 Samata												
NOP	497310082167690020												
Dikisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak													
ALAMAT OP	Jl. Jenderal Sudirman No. 36 Makassar												
Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran : PPh Final Pasal 4 ayat (2)											
411128	900	Penyewaan tanah dan/atau bangunan											
Masa Pajak				Tahun Pajak									
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2015	
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan												Dikisi Tahun Terbilang Pajak	
Nomor Ketetapan													
Dikisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SPPMB, SPPKBT													
Jumlah Pembayaran : Rp 6.200.000												Dikisi dengan rupiah penuh	
Terbilang : Enam juta dua ratus ribu rupiah													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran						Wajib Pajak/Penyetor							
Tanggal						Makassar, Tanggal 5 Juli 2015							
Cup dan tanda tangan						Cup dan tanda tangan							
Nama Jelas :						Bendahara UIN Alauddin Makassar Nama Jelas : Sunniti							
"Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"													
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													

Pengisian SSP PPh pasal 4 ayat 2 yang salah seperti contoh di atas (**dilingkari merah**), dimana kode jenis setoran **900** adalah kode untuk PPN dan PPh Pasal 22 padahal yang benar adalah **403** untuk PPh pasal 4 ayat (2)

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR Untuk Arsip Wajib Pajak	1									
	NPWP : 0 2 0 5 1 3 6 3 0 8 0 4 0 0 0 <i>Dibeli sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i> NAMA WP : CV. AMRIH NEW KARYA ALAMAT WP : JL. SULTAN ALAUDDIN II NO. 11 MAKASSAR												
NOP : _____ <i>Dibeli sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i> ALAMAT OP : _____													
Kode Akun Pajak 4 1 1 2 1 1		Kode Jenis Setoran 9 0 0		Uraian Pembayaran : PPN Jasa Konstruksi oleh Pemungut PPN Dalam Negeri									
Masa Pajak											Tahun Pajak 2 0 1 5 <i>Dibeli Tahun teratasnya Pajak</i>		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
<i>Beritanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang bersangkutan</i>													
Nomor Ketetapan : _____ / _____ / _____ / _____ <i>Dibeli sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>													
Jumlah Pembayaran : Rp 350.000.000 <i>Dibeli dengan rupiah penuh</i> Terbilang : seratus lima puluh juta rupiah													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal _____ <i>Cap dan tanda tangan</i>						Wajib Pajak/Penyetor Makassar , Tanggal 22 Juli 2015 <i>Cap dan tanda tangan</i> <div style="text-align: center; font-size: 2em; color: red; font-weight: bold;">??</div>							
Nama Jelas : _____						Nama Jelas : Sunniati							
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "													
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													

F.2.0.32.01

Pada contoh Pengisian SSP PPh pasal 4 ayat (2) di atas jika diamati sepiintas maka sepertinya sudah benar karena Kode Akun Pajak, Kode Jenis Setoran, dan Uraian pembayaran dan kolom-kolom lain sudah terisi, tapi ternyata masih ada yang kurang yakni **tanda tangan dan Cap Stempel** wajib pajak/penyetor (**lihat logo ?? merah**).